

**PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO  
KOTA BITUNG  
MENURUT PENGELUARAN  
2013-2017**

<https://bitungkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG**  
*BPS - Statistics of Bitung City*

**PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO  
KOTA BITUNG  
MENURUT PENGELUARAN  
2013-2017**

<https://bitungkota.bps.go.id>



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA BITUNG  
MENURUT PENGELUARAN**

**2013 - 2017**

<https://bitungkota.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA BITUNG  
MENURUT PENGELUARAN 2013 - 2017**

ISSN/ISBN : -  
Nomor Publikasi : 71720.1802  
Katalog BPS : 9302020.7172

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : vii + 60 halaman

Naskah:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit:  
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:  
Badan Pusat Statistik Kota Bitung

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<https://bitungkota.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA BITUNG  
MENURUT PENGELUARAN 2013- 2017**

---

**Anggota Tim Penyusun:**

Pengarah : Ir. Novri Poultje Mokoagouw

Editor : Randy Pratama Lumenta, SST

Penulis : Windha Wijaya, SST

Pengolah data : Windha Wijaya, SST

<https://bitungkota.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

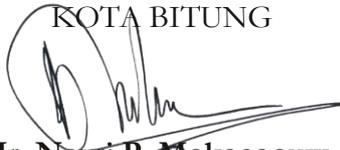
Publikasi ini merupakan publikasi pertama yang menyajikan data PDRB Tahun Dasar Baru (2010=100), dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bitung, 10 Agustus 2018  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BITUNG



Ir. Novri P. Mokoagouw

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	v
<b>Daftar Grafik</b> .....	vii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	3
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	4
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB .....	7
<b>BAB II Metode Estimasi dan Sumber Data</b> .....	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	12
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	14
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	19
2.5 Perubahan Inventori .....	22
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa .....	25
<b>BAB III Tinjauan Ekonomi Menurut PDRB Pengeluaran Bitung</b> .....	26
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran Bitung .....	27
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran .....	34
3.2.1 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	34
3.2.2 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	38
3.2.3 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah .....	39
3.2.4 Perkembangan Modal Tetap Bruto .....	42

---

3.2.5 Perubahan Inventori .....	43
3.2.6 Ekspor Barang dan Jasa .....	44
3.2.7 Impor Barang dan Jasa .....	44
<b>BAB IV Perkembangan Agregat PDRB Pengeluaran Kota Bitung .....</b>	<b>47</b>
4.1 PDRB (Nominal) .....	48
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB .....	49
4.3 Average Propensity To Consume (APC) dan Average Propensity To Save (APS) .....	50
4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	51
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>53</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>55</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>61</b>

---

<https://bitungkota.nps.go.id>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2013-2017 .....	27
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2013-2017 .....	28
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2013-2017.....	30
Tabel 4	LajuPertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran 2013-2017 .....	32
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, 2013-2017 .....	35
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2013-2017 .....	36
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2013-2017 .....	36
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2013-2017 .....	37
Tabel 9	Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2013-2017 .....	38
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT, 2013-2017 .....	39
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 2013-2017 .....	40
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB .....	42
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori 2013-2017 .....	43

Tabel 14	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa 2013-2017.....	44
Tabel 15	Perkembangan Impor 2013-2017 .....	45
Tabel 16	PDRB dan PDRB Perkapita, 2013-2017 .....	48
Tabel 17	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB 2013-2017.....	49
Tabel 18	Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save	50
Tabel 19	Incremental Capital Output Ratio, 2013-2017 .....	52

## DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1	PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013-2017.....	28
Grafik 2	PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,2013-2017...	29
Grafik 3	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013-2017.....	30
Grafik 4	Distribusi PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013-2017.....	31
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2013-2017.....	32

<https://bitungkota.bps.go.id>



## ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

<https://bitungkota.bps.go.id>

## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

---

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

## Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

## Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

## Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

---

<sup>4</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

## Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

#### Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



## ***BAB II***

# ***METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA***

<https://bitungkota.bps.go.id>

## 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

### i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>5</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

<sup>5</sup> Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

#### iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

#### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

### i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

### iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

**v. Metoda Estimasi**

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

### iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

### iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \text{Output} - \\ & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ & \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ & \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

<https://bitungkota.bps.go.id>

## 2.4PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

### ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

### iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

#### iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

#### v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

##### ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :  $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi :  $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

<https://bitungkota.bps.go.id>

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

### i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Pengalihan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHBPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

#### v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

- a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) × Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -  
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan × IHPB rata-rata (t)

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

### ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

### iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

### iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



**BAB III**

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BITUNG**

**MENURUT PDRB PENGELUARAN**

**2013 -2017**

<https://bitungkota.bps.go.id>

### 3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur ekonomi Kota Bitung akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode tahun 2013-2017, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Bitung digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

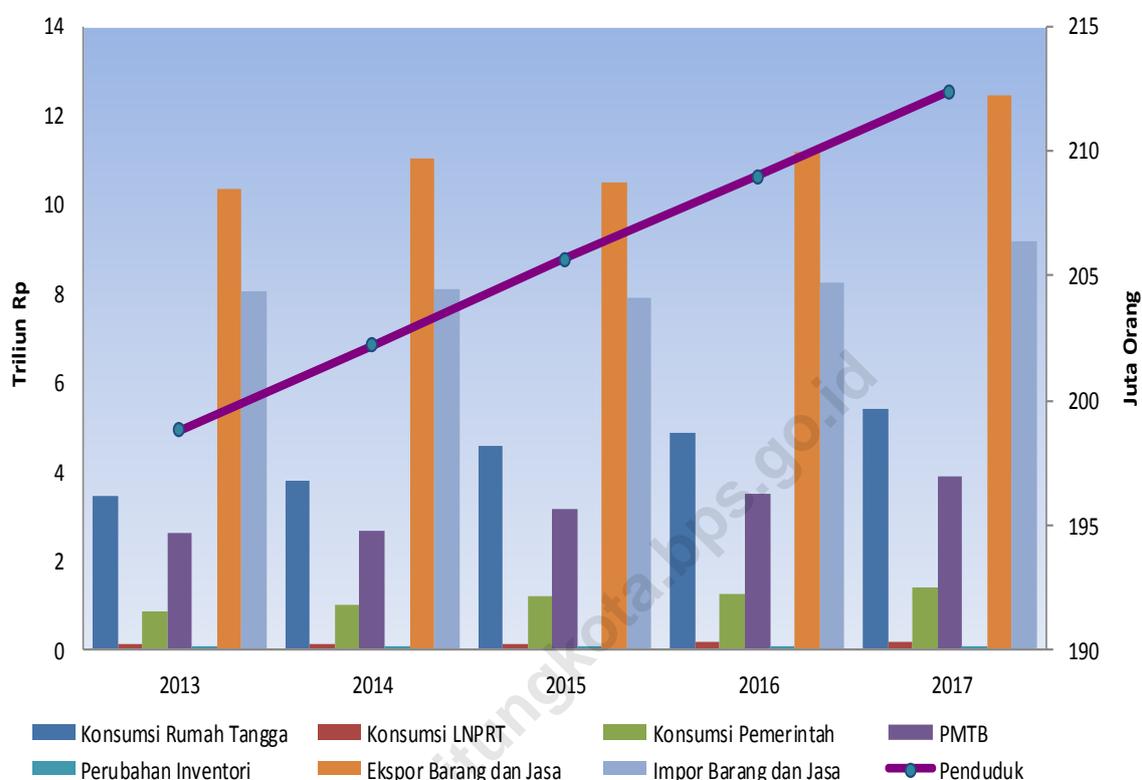
Kondisi perekonomian Kota Bitung menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Pada periode tahun 2013 - 2017 PDRB Kota Bitung, atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 9.381 miliar Rupiah (2013); 10.517 miliar Rupiah (2014); 11.634 miliar Rupiah (2015); 12.682 miliar Rupiah (2016); dan 14.084 miliar Rupiah (2017). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Bitung pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bitung  
2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 473	3 780	4 567	4 887	5418
2. Konsumsi LNPRT	110,13	121,46	132,71	144,54	161,17
3. Konsumsi Pemerintah	876,08	997,58	1 185	1 246	1390
4. PMTB	2 618	2 647	3 150	3475	3874
5. Perubahan Inventori	14,80	16,19	12,98	6,61	3,56
6. Ekspor	10 335	11 043	10 506	11 177	12442
7. Impor	8 046	8 087	7 919	8 254	9204
Total PDRB	9 381	10 517	11 634	12 682	14084

**Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bitung  
2013 - 2017**



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Bitung pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

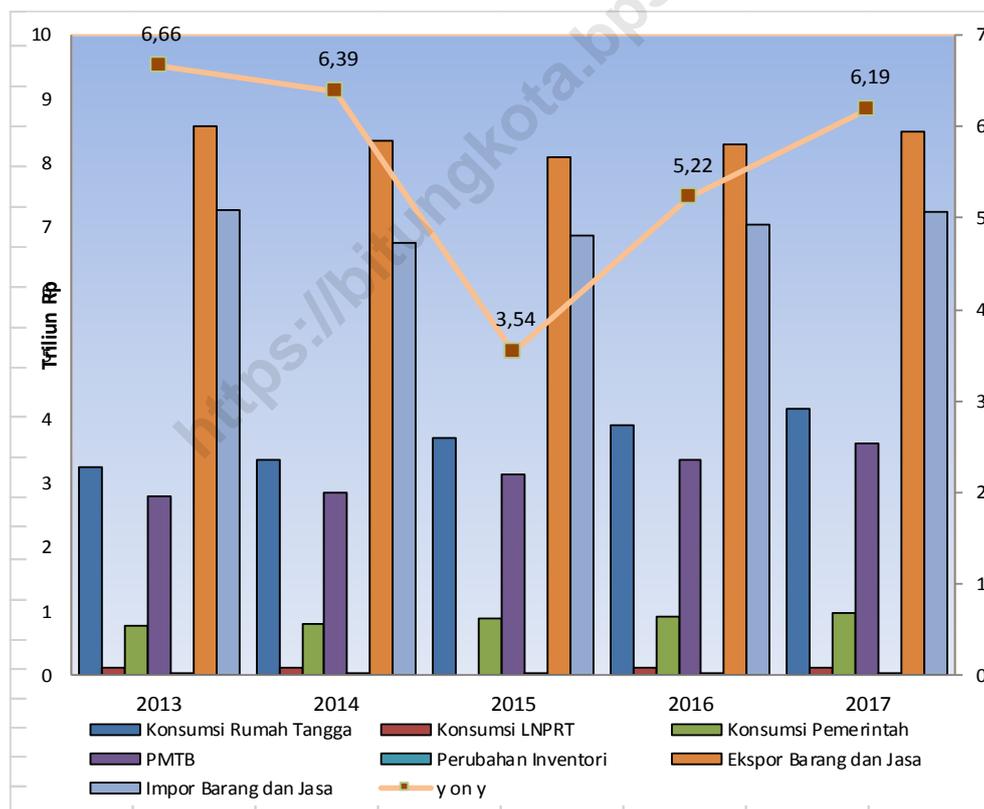
**Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung  
2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 251	3 377	3 715	3 918	4172
2. Konsumsi LNPRT	102,78	105,16	105,37	106,43	109,92
3. Konsumsi Pemerintah	755,81	801,91	882,10	912,48	969,72

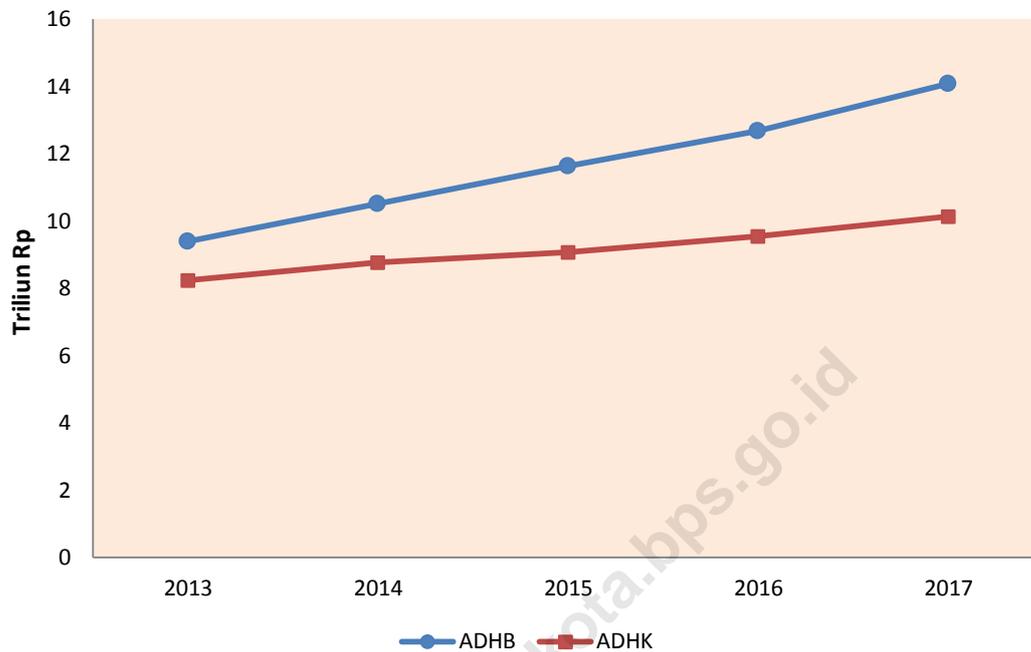
4. PMTB	2 792	2 859	3 128	3 350	3607
5. Perubahan Inventori	11,72	10,70	13,32	7,01	3,75
6. Ekspor	8 572	8 349	8 097	8 282	8504
7. Impor	7 256	6 748	6877	7 038	7239
Total PDRB	8 229	8 755	9 065	9 538	10128

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kota Bitung meningkat, yakni sebesar 8229 miliar Rupiah (2013); 8755 miliar Rupiah (2014); 9065 miliar Rupiah (2015); 9538 miliar Rupiah (2016); dan 10128 miliar Rupiah (2017). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung di tahun 2015 hanya sebesar 3,54 persen, kemudian terus meningkat sampai 6,19 persen di tahun 2017.

**Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung 2013 - 2017**



**Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten/Kota Bitung 2013-2017**

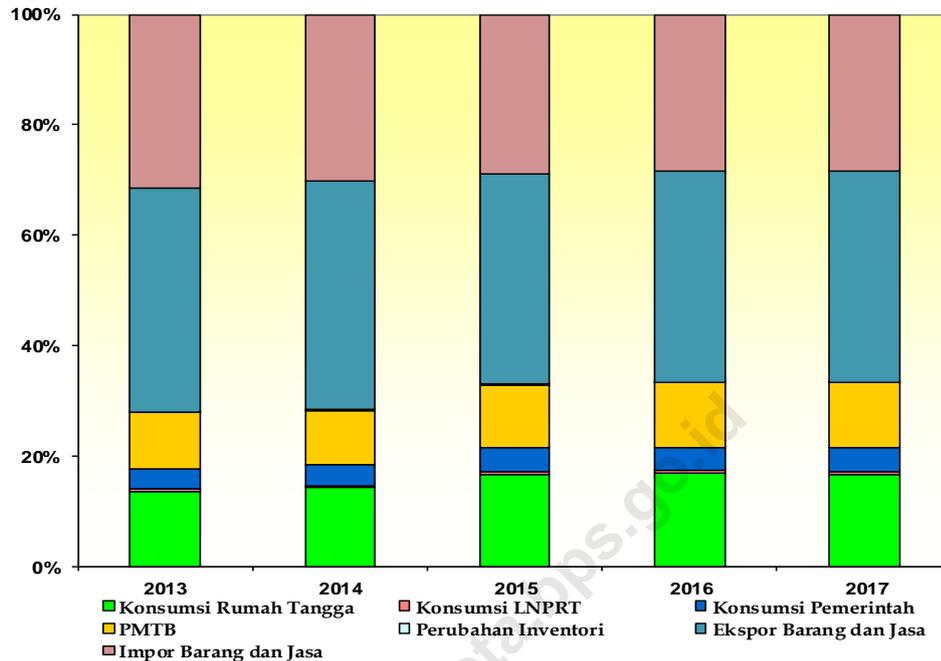


Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bitung 2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	37,02	35,94	39,26	38,54	38,47
2. Konsumsi LNPRT	1,17	1,15	1,14	1,14	1,14
3. Konsumsi Pemerintah	9,34	9,49	10,19	9,82	9,87
4. PMTB	27,91	25,17	27,07	27,40	27,51
5. Perubahan Inventori	0,16	0,15	0,11	0,05	0,03
6. Ekspor	110,17	105,00	90,30	88,13	88,34
7. Impor	85,77	76,89	68,07	65,09	65,35
Total PDRB	100	100	100	100	100

**Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,  
Kota Bitung 2013 - 2017**



Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa selama periode tahun 2013-2017, berkisar 40-50 persen produk yang dikonsumsi di wilayah domestik, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. PMTB yang menjadi gambaran investasi fisik di Kota Bitung menduduki urutan kedua, di kisaran 20-30 persen. Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, produk Kota Bitung mampu menembus pasar luar daerah maupun internasional. Net ekspor antar daerah positif menunjukkan kondisi surplus, yaitu nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya. Hal ini berarti bahwa Kota Bitung mempunyai andil yang besar sebagai pemasok produk barang dan jasa luar daerah.

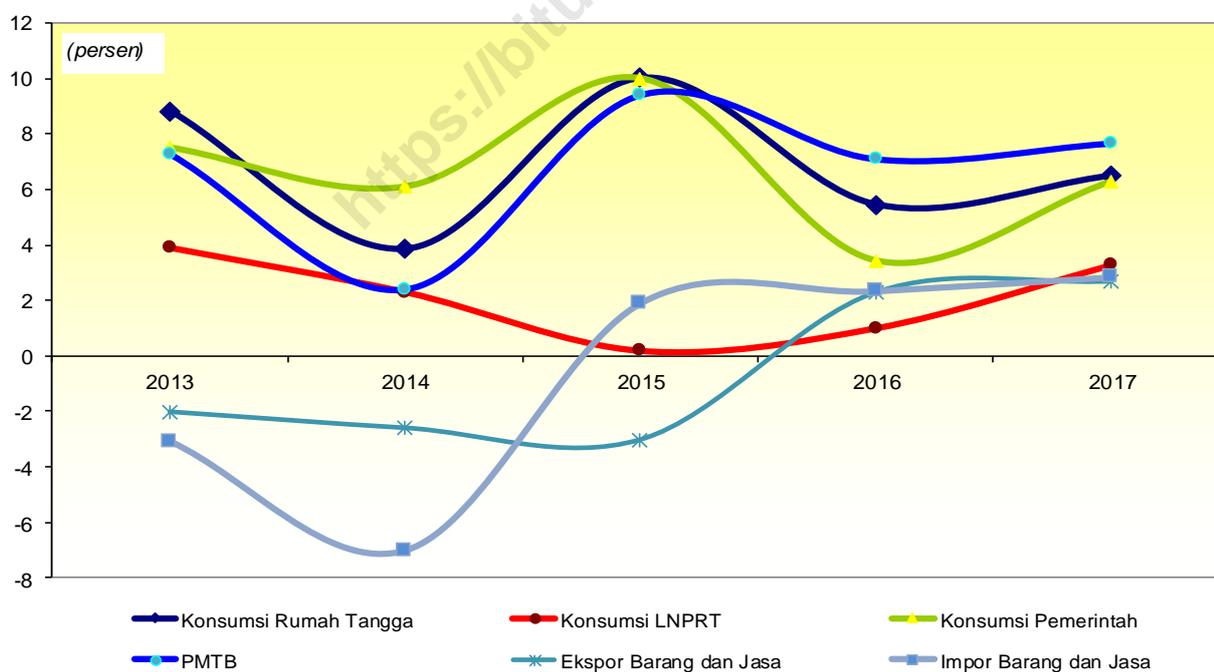
Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bitung dari tahun 2013-2017 secara rata-rata mencapai 3,5-6,6 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,66 persen (2013); 6,39 persen (2014); 3,54 persen (2015); 5,22 persen (2016); 6,19 persen (2017) . Pertumbuhan tertinggi terjadi

pada tahun 2013 yakni sebesar 6,66 persen. Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung 2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8,83	3,85	10,03	5,46	6,49
2. Konsumsi LNPRT	3,92	2,32	0,20	1,01	3,28
3. Konsumsi Pemerintah	7,50	6,10	10	3,44	6,27
4. PMTB	7,27	2,42	9,40	7,10	7,66
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	-2,02	-2,60	-3,02	2,28	2,68
7. Impor	-3,08	-7,01	1,91	2,35	2,85
Total PDRB	6,66	6,39	3,54	5,22	6,19

**Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung 2013 - 2017**



Indeks implisit<sup>6</sup> PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang

<sup>6</sup> Indeks perkembangan

digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2013 - 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Bitung  
2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	2010	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	106,82	111,93	122,93	124,75	129,86
2. Konsumsi LNPRT	100,00	107,15	115,50	125,95	135,81	146,62
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	115,91	124,40	134,35	136,54	143,32
4. PMTB	100,00	93,79	92,57	100,69	103,71	107,40
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor	100,00	120,57	132,26	129,75	134,96	146,30
7. Impor	100,00	110,89	119,85	115,16	117,28	127,16
Total PDRB	100,00	114,00	120,13	128,35	132,97	139,06

## 3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Bitung untuk periode 2013 - 2017.

### 3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bitung, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Bitung maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 - 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Bitung  
2013–2017**

Uraian	2010	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi Rumah Tangga						
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	2 732	3 473	3 780	4 567	4 887	5418
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	2 732	3 251	3 377	3 715	3 918	4172
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	39,91	37,02	35,94	39,26	38,54	38,47
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun ( <i>Ribu Rp</i> )						
a. ADHB	55 051	71 425	76 413	90 762	96 551	104 261
b. ADHK 2010	55 051	66 864	68 267	73 832	77 397	80 286
Rata-rata konsumsi per kapita per tahun ( <i>Ribu Rp</i> )						
a. ADHB	14 510	17 472	18 692	22 206	23 386	25 509
b. ADHK 2010	14 510	16 356	16 699	18 064	18 747	19 643
<u>Pertumbuhan</u>						
a. Total konsumsi RT		8,83	3,85	10,03	5,46	6,49
b. Per RT		6,91	2,10	8,15	4,83	3,73
c. Per kapita		6,91	2,10	8,17	3,78	4,78
Jumlah RT ( <i>unit</i> )	49627	48628	49462	50320	50621	51968
Jumlah penduduk ( <i>org</i> )	188290	198794	202204	205675	208995	212409

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013-2017 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 39,26 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 35,94 persen.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2013, secara umum

setiap rumah tangga di Kota Bitung menghabiskan dana sekitar 71,43 juta rupiah setahun, untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun non makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 76,41 juta rupiah (2014); 90,76 juta rupiah (2015); 96,55 juta rupiah (2016), dan menjadi 104,26 juta rupiah (2017).

Sementara itu, pada perkiraan atas dasar harga Konstan 2010, rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh di kisaran 2-8 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2015, yakni sebesar 8,15 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kota Bitung meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” berkisar antara 2-8 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga Konstan di tahun 2013 adalah sebesar 8,83 persen. Kemudian meningkat pada tiga tahun berikutnya, yaitu berturut-turut sebesar 3,85 persen (2014); 10,03 persen (2015); 5,46 persen (2016); dan 6,49 persen (2017). Sementara itu, konsumsi per kapita tumbuh 7,18 persen ditahun 2013; 2,10 persen di tahun 2014; 8,17 persen di tahun 2015; 3,78 persen di tahun 2016; dan 4,78 persen di tahun 2017. Terlihat bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Secara rata-rata dari tahun 2013-2017, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Bitung, bahwa konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan.

Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung berada di kisaran yang sama, yaitu 42,52 persen (2013); 41,24 persen (2014); 40,44 persen (2015); 43,34 persen (2016) ,dan 43,23 persen (2017).

**Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Bitung  
2013 – 2017<sup>7</sup>**

Kelompok Konsumsi	2013 – 2017 <sup>7</sup>					
	2010	2013	2014	2015	2016	(%) 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
a. Makanan, Minuman, & Rokok	45,60	42,52	41,24	40,44	43,34	43,23
b. Pakaian & Alas Kaki	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

<sup>7</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,26	7,80	7,78	7,95	7,72	7,86
d.	Kesehatan & Pendidikan	4,10	4,44	4,49	4,42	4,45	4,38
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	37,79	39,27	40,08	41,03	38,50	38,73
f.	Hotel & Restoran	3,17	3,45	3,72	3,66	3,52	3,32
g.	Lainnya	1,81	2,29	2,46	2,29	2,25	2,25
Total Konsumsi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 7,62 persen (2013); 1,44 persen (2014); 7,54 persen (2015); 8,90 persen (2016); dan 6,53 persen (2017). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

**Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kota Bitung 2013 – 2017<sup>8</sup>**

Kelompok Konsumsi	2013					2014					2015					2016					2017				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
a.	Makanan, Minuman, & Rokok	7,62	1,44	7,54	8,90	6,53																			
b.	Pakaian & Alas Kaki	10,72	5,70	9,33	8,04	7,99																			
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,99	3,51	12,55	3,64	5,95																			
d.	Kesehatan & Pendidikan	6,98	7,36	8,44	4,94	5,05																			
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	8,55	5,18	12,68	2,75	6,79																			

<sup>8</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

f. Hotel & Restoran	10,19	10,29	8,19	2,40	3,47
g. Lainnya	6,90	9,79	6,50	4,97	9,81

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2015, dan pada tahun-tahun berikutnya pergerakan harga berfluktuasi.

**Tabel 9**  
**Pertumbuhan Indeks Implisit**  
**Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga, 2013 - 2017**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-1,80	4,04	10,18	5,31	3,79
b. Pakaian dan Alas Kaki	13,94	5,09	7,67	1,26	3,26
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-9,81	4,75	9,72	0,29	6,62
d. Kesehatan & Pendidikan	-3,68	2,37	9,67	2,71	3,96
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,16	5,61	9,76	-2,25	4,42
f. Hotel & Restoran	-1,09	6,39	9,93	0,40	1,17
g. Lainnya	-4,17	6,52	5,31	0,15	1,14

### 3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Peranan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan proporsinya terhadap PDRB menurut pengeluaran selama periode tahun 2010-2015 hanya berada di kisaran 1 persen.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT  
Kota Bitung  
2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	110,13	121,46	132,71	144,54	161,17
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	102,78	105,16	105,37	106,43	109,92
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,17	1,15	1,14	1,14	1,14

Berdasarkan tabel 10, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010, selama periode tahun 2013-2017, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tidak terlalu signifikan. Hal teraebut memperlihatkan bahwa kegiatan-kegiatan non profit tidak terlalu berkembang subur di Kota Bitung, sesuai dengan karakteristik kota Bitung yang merupakan daerah perkotaan dimana masyarakatnya cenderung lebih individualistis dan tidak terlalu aktif dalam kegiatan sosial akibat kesibukan dan tuntutan pekerjaan sehari-hari. Jumlah lembaga non profit yang melayani rumah tangga juga tidak meningkat signifikan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1 persen.

### 3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh

barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Bitung 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	876,08	997,58	1185,13	1245,93	1389,83
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	755,81	801,91	882,10	912,48	969,72
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	9,34	9,49	10,19	9,82	9,87
Konsumsi Pemerintah per- kapita ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	4407	4934	5762	5962	6543
b. ADHK 2010	3802	3966	4289	4366	4565
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	223034	253967	301712	332336	436230
b. ADHK 2010	192417	204151	224568	243394	304368
<u>Pertumbuhan</u>					
a. Total konsumsi pemerintah	7,50	6,10	10,00	3,44	6,27
b. Konsumsi per kapita	5,61	4,31	8,14	1,80	4,56
c. Konsumsi per pegawai	10,73	6,10	10,00	8,38	25,05
<u>Jumlah Pegawai Pemerintah</u>	3928	3928	3928	3749	3186
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	198794	202204	205675	208995	212409

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran

konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga Berlaku sebesar 0,88 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 1,4 triliun rupiah.

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan di masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 4407 ribu rupiah, terus meningkat dan mencapai 6543 ribu rupiah pada tahun 2017.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 7,50 persen di tahun 2013; 6,10 persen (2014); 10,00 persen (2015); 3,44 persen (2016); dan 6,27 persen (2017).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 223 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013 dan 2015, yaitu masing-masing sebesar 10,73 persen dan 10,00 persen

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 10 persen; untuk konsumsi per kapita 8,14 persen; sedangkan untuk konsumsi per pegawai pertumbuhan sebesar 10 persen.

Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung meningkat dengan masing-masing adalah 51 (2013); 51 (2014); 52 (2015); 56 (2016); 67 (2017). Hal ini berarti rata-rata setiap tahun, selama periode 2013-2017, setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 55 penduduk.

### 3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>9</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (enam) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 berfluktuasi dari 7,27 persen (2013) menjadi 7,66 persen (2017), sementara di tahun lainnya masing-masing 2,42 persen(2014); 9,40 persen(2015); dan 7,10 persen(2016).

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Bitung  
2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	2 618	2 647	3150	3475	3874
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2 792	2 859	3128	3350	3607
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	27,91	25,17	27,07	27,40	27,51
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Miliar Rp)	2 202	2 286	2 644	2843	3099
(%)	78,88	79,96	84,51	84,86	85,91
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	590	573	484	507	508
(%)	21,12	20,04	15,49	15,14	14,09
Total PMTB (Miliar Rp)	2 792	2 859	3128	3350	3607
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					

<sup>9</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

a. Bangunan	9,46	3,82	15,63	7,54	8,99
b. Non Bangunan	-0,18	-2,82	-15,46	4,71	0,19
Total PMTB	7,27	2,42	9,40	7,10	7,66

Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2013-2017 (tabel 12). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut.

### 3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Bitung  
2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	14,80	16,19	12,98	6,61	3,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	11,72	10,70	13,32	7,01	3,75
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,16	0,15	0,11	0,05	0,03

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi

menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Dilihat atas dasar harga Berlaku, di tahun 2010 perubahan inventori tercatat sebesar 14,80 miliar rupiah (2013); 16,19 miliar rupiah (2014); 12,98 miliar rupiah (2015); 6,61 miliar rupiah (2016), dan 3,56 miliar rupiah (2017). Proporsi komponen ini terhadap total PDRB juga sangat kecil, di bawah 1 persen.

### 3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 14**  
**Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa**  
**2013 – 2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Luar Negeri					
a. ADHB (Miliar Rp)	10 335	11 043	10 506	11 177	12442
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	8 572	8 349	8097	8282	8504
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	110,17	105,00	90,30	88,13	88,34
Total ekspor	-2,02	-2,60	-3,02	2,28	2,68

Secara total, nilai ekspor selama periode 2013-2017 menunjukkan penurunan di 2015, peningkatan terjadi di tahun 2013-2014 dan 2015-2017. Pada tahun 2013, ekspor Kota Bitung tercatat senilai 10335 miliar rupiah, meskipun terjadi penurunan di tahun 2015 tetapi di tahun 2017 meningkat menjadi 12442 milyar rupiah

### 3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Sulawesi Utara. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai

impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Bitung terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Bitung di luar daerah, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 15 menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kota Bitung pada periode tahun 2013-2017 atas dasar harga Berlaku cenderung meningkat, meskipun di tahun 2015 mengalami penurunan. Di tahun 2013 nilai impor senilai 8046 milyar rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 9204 milyar rupiah di tahun 2017.

Pola perkembangan impor berdasarkan atas dasar harga Konstan cenderung berfluktuasi yakni dari 7256 milyar rupiah (2013); 6748 milyar rupiah (2014); 6877 milyar rupiah (2015); 7038 milyar rupiah (2016); dan 7239 milyar rupiah di tahun 2017.

**Tabel 15. Perkembangan Impor Kota Bitung  
2013 – 2017**

<b>Uraian</b>	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor	8046	8087	7919	8254	9204
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	7256	6748	6877	7038	7239
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )					
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	85,77	76,89	68,07	65,09	65,35
Pertumbuhan <sup>10</sup>	-3,08	-7,01	1,91	2,35	2,85

Proporsi impor terhadap PDRB cenderung menurun. Pada tahun 2013 proporsinya sebesar 85,77 persen, dan menurun menjadi 76,89 persen. Tahun-tahun berikutnya proporsinya sebesar 68,07 persen (2015); 65,09 persen (2016); dan 65,35 persen (2017)

<sup>10</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2017 sebesar 2,85 persen. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan impor turun menjadi minus 3,08 persen (2013) dan minus 7,01 (2014).

<https://bitungkota.bps.go.id>



**BAB IV**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB**  
**PENGELUARAN KOTA BITUNG**  
**2013 - 2017**

<https://bitungkota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

**Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Bitung  
2013 – 2017**

<b>U r a i a n</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB ( <i>Miliar Rp</i> )					
- ADHB	9 381,07	10 517,42	11 634,28	12 682,46	14084,45
- ADHK 2010	8 229,15	8 755,30	9 064,84	9 537,84	10128,30
PDRB per kapita ( <i>Ribu Rp</i> )					
- ADHB	47 190	52 014	56 566	60 683	66308
- ADHK 2010	41 395	43 299	44 074	45 637	47683
Pertumbuhan					
PDRB per kapita ADHK 2010	4,78	4,60	1,79	3,55	4,48
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	198,79	202,20	205,68	209,00	212,41
Pertumbuhan	1,79	1,72	1,72	1,61	1,63

PDRB per kapita Kota Bitung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bitung rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu positif, walaupun di tahun 2015 ada terjadi perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1-2 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

#### 4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRIT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Bitung 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) Miliar Rp					
a. Rumah tangga	3 473	3 780	4 567	4 887	5418
b. LNPRIT	110	121	133	145	161
c. Pemerintah	876	998	1 185	1 246	1390
Jumlah	4 459	4 899	5 885	6 278	6969
PDRB (ADHB) Miliar Rp	9 381	10 517	11 634	12 682	14084
Proporsi	47,54	46,58	50,58	49,50	49,48

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

#### 4.3 AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME (APC) DAN AVERAGE PROPENSITY TO SAVE (APS)

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan.

Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$APS = \frac{S}{Y_d} \quad \text{APC} = \frac{C}{Y_d}$$

Di mana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan  $Y_d$  = Pendapatan disposabel. Perlu diketahui pula bahwa  $APC + APS = 1$

**Tabel 18. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save  
Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Disposabel ( $Y_d$ ) (Miliar Rp)	7093	7562	9048	9759	10847
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	3 473	3 780	4 567	4 887	5418
Total Konsumsi LNPRT (ADHB) (Miliar Rp)	110	121	133	145	161
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) (Miliar Rp)	876	998	1 185	1 246	1390
Total Konsumsi Akhir (ADHB)	4 459	4 899	5 885	6 278	6969

(Miliar Rp)

APC	0,63	0,65	0,65	0,64	0,64
Tabungan (Miliar Rp)	2633,25	2662,97	3162,82	3481,50	3877,61
APS	0,37	0,35	0,35	0,36	0,36

Keterangan : \* sementara    \*\* sangat sementara

#### 4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana:  $I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = Output tahun ke t

$Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

**Tabel 19. Incremental Capital Output Ratio, Kota Bitung  
2013-2017**

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	8 229,15	8 755,30	9 064,84	9 537,84	10128,30
Perubahan (miliar rupiah)	513,75	526,15	309,54	473,00	590,46
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	2 792	2 859	3128	3350	3607
ICOR	5,43	5,43	10,11	7,08	6,11



<https://bitungkota.bps.go.id>

**BAB V**  
**PENUTUP**

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bitung pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Bitung terhadap ekonomi luar daerah.

Tabel 1  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

3						
4	<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
5	(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	3.473.269,95	3.779.528,02	4.567.138,87	4.887.487,02	5.418.250,23
7	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.476.932,81	1.558.792,37	1.847.067,24	2.118.275	2.342.073
8	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7.593,34	8.434,88	9.929,42	10.862,69	12.113
9	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan	271.071,39	293.897,50	362.940,70	377.226,47	426.143
10	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	154.364,71	169.657,87	201.768,82	217.490,61	237.522
11	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Bu	1.363.788,40	1.514.948,96	1.873.679,77	1.881.832,87	2.098.418
12	1.f. Hotel dan Restoran	119.878,67	140.659,14	167.287,62	171.977,44	180.021
13	1.g. Lainnya	79.640,64	93.137,30	104.465,31	109.822,25	121.960
14						
15	<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	110.132	121.462	132.713,87	144.536,62	161.172
16						
17	<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	876.077	997.583	1.185.126	1.245.928,66	1.389.828
18						
19	<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	2.618.448	2.646.785	3.149.839	3.474.892	3.874.053
20	4.a. Bangunan	2.080.807,40	2.097.548	2.685.793,96	2.981.210,23	3.368.156
21	4.b. Non-Bangunan	537.641	549.237	464.045,15	493.681,36	505.897
22						
23	<b>5. Perubahan Inventori</b>	14.797,21	16.189,46	12.983,68	6.609,45	3.559
24						
25	<b>6. Ekspor</b>	10.334.756,06	11.042.977	10.505.838	11.177.432,93	12.442.042
26						
27	<b>7. Impor</b>	8.046.408	8.087.100	7.919.362	8.254.431,00	9.204.457
28						
29	<b>PDRB (1 s.d 7)</b>	<b>9.381.073</b>	<b>10.517.425</b>	<b>11.634.277</b>	<b>12.682.455</b>	<b>14.084.447,14</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

**Tabel 2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Pengeluaran, Kota Bitung**

35	<b>Komponen Pengeluaran</b>	2013	2014	2015	2016	2017
36	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	3.251.481	3.376.643	3.715.239	3.917.932	4.172.920
38	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.374.849	1.394.682	1.499.852	1.633.333	1.739.992
39	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8.595	9.085	9.933	10.731	11.588
40	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan	267.871	277.263	312.063	323.421	342.663
41	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	136.811	145.878	159.277	167.151	175.531
42	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan	1.269.065	1.334.842	1.504.144	1.545.466	1.650.352
43	1.f. Hotel dan Restoran	116.455	128.438	138.957	142.288	147.223
44	1.g. Lainnya	77.835	85.455	91.013	95.541	104.910
45						
46	<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	102.773	105.163	105.369	106.429	109.922
47						
48	<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	755.815	801.906	882.103	912.483	969.716
49						
50	<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	2.791.878	2.859.375	3.128.278	3.350.480	3.607.077
51	4.a. Bangunan	2.202.227	2.286.352	2.643.822	2.843.209	3.098.856
52	4.b. Non-Bangunan	589.652	573.023	484.456	507.277	508.221
53						
54	<b>5. Perubahan Inventori</b>	11.720	10.700	13.316	7.007	3.754
55						
56	<b>6. Ekspor</b>	8.571.724	8.349.256	8.097.222	8.261.853	8.504.209
57						
58	<b>7. Impor</b>	7.256.246	6.747.738	6.876.684	7.038.340	7.238.694
59						
60	<b>PDRB (1 s.d 7)</b>	<b>8.229.152</b>	<b>8.755.305</b>	<b>9.064.842</b>	<b>9.537.845</b>	<b>10.128.304</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

**Tabel 3**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Pengeluaran, Kota Bitung**

66	<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
67	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
68	<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	37,02	35,94	33,26	38,54	38,47
69	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	15,74	14,82	15,88	16,70	16,63
70	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
71	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan	2,89	2,79	3,12	2,97	3,03
72	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,65	1,61	1,73	1,71	1,69
73	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan	14,54	14,40	16,10	14,84	14,90
74	1.f. Hotel dan Restoran	1,28	1,34	1,44	1,36	1,28
75	1.g. Lainnya	0,85	0,89	0,90	0,87	0,87
76						
77	<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	1,17	1,15	1,14	1,14	1,14
78						
79	<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	9,34	9,49	10,19	9,82	9,87
80						
81	<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	27,91	25,17	27,07	27,40	27,51
82	4.a. Bangunan	22,18	19,94	23,09	23,51	23,91
83	4.b. Non-Bangunan	5,73	5,22	3,99	3,89	3,59
84						
85	<b>5. Perubahan Inventori</b>	0,16	0,15	0,11	0,05	0,03
86						
87	<b>6. Ekspor</b>	110,17	105,00	90,30	88,13	88,34
88						
89	<b>7. Impor</b>	85,77	76,89	68,07	65,09	65,35
90						
91	<b>PDRB (1 s.d 7)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel 4  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

37	<b>Komponen Pengeluaran</b>	2013	2014	2015	2016	2017
38	(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
39	<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	8,83	9,85	10,03	5,46	6,49
100	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,62	1,44	7,54	8,90	6,53
101	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	10,72	5,70	9,33	8,04	7,99
102	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan	17,99	3,51	12,55	3,64	5,95
103	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,98	7,36	8,44	4,94	5,05
104	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan	8,55	5,18	12,68	2,75	6,73
105	1.f. Hotel dan Restoran	10,19	10,29	8,19	2,40	3,47
106	1.g. Lainnya	6,90	9,79	6,50	4,97	9,81
107						
108	<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	3,92	2,32	0,20	1,01	3,28
109						
110	<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	7,50	6,10	10,00	3,44	6,27
111						
112	<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	7,27	2,42	9,40	7,10	7,66
113	4.a. Bangunan	9,46	3,82	15,63	7,54	8,99
114	4.b. Non-Bangunan	-0,18	-2,82	-15,46	4,71	0,19
115						
116	<b>5. Perubahan Inventori</b>	-80,81	-8,70	24,45	-47,38	-46,42
117						
118	<b>6. Ekspor</b>	-2,02	-2,60	-3,02	2,28	2,68
119						
120	<b>7. Impor</b>	-3,08	-7,01	1,91	2,35	2,85
121						
122	<b>PDRB (1 s.d 7)</b>	<b>6,66</b>	<b>6,39</b>	<b>3,54</b>	<b>5,22</b>	<b>6,19</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel 5  
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)  
Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

128	<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
129	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
130	<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	106,82	111,93	122,93	124,75	129,86
131	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	107,43	111,77	123,15	123,69	134,60
132	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	88,35	92,84	99,97	101,23	104,53
133	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan	101,19	106,00	116,30	116,64	124,36
134	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	112,83	115,51	126,68	130,12	135,27
135	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan	107,46	113,49	124,57	121,76	127,15
136	1.f. Hotel dan Restoran	102,94	109,51	120,39	120,87	122,28
137	1.g. Lainnya	102,32	108,99	114,78	114,95	116,25
138						
139	<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	107,15	115,50	125,95	135,81	146,62
140						
141	<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	115,91	124,40	134,35	136,54	143,32
142						
143	<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	93,79	92,57	100,69	103,71	107,40
144	4.a. Bangunan	94,49	91,74	101,59	104,85	108,69
145	4.b. Non-Bangunan	91,18	95,85	95,79	97,32	99,54
146						
147	<b>5. Perubahan Inventori</b>	126,25	151,30	97,50	94,93	94,81
148						
149	<b>6. Ekspor</b>	120,57	132,26	129,75	134,96	146,30
150						
151	<b>7. Impor</b>	110,89	119,85	115,16	117,28	127,16
152						
153	<b>PDRB (1 s.d 7)</b>	<b>114,00</b>	<b>120,13</b>	<b>128,35</b>	<b>132,97</b>	<b>139,06</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel 6  
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit  
Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)  
Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

159	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
160	(I)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
161	<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	-0,69	4,78	9,83	1,48	4,10
162	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-1,80	4,04	10,18	5,31	3,79
163	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	13,94	5,09	7,67	1,26	3,26
164	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan	-8,81	4,75	9,72	0,29	6,62
165	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-3,68	2,37	9,67	2,71	3,96
166	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan	3,16	5,61	9,76	-2,25	4,42
167	1.f. Hotel dan Restoran	-1,09	6,39	9,93	0,40	1,17
168	1.g. Lainnya	-4,17	6,52	5,31	0,15	1,14
169						
170	<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	-0,57	7,79	9,05	7,82	7,97
171						
172	<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	3,56	7,32	8,00	1,63	4,97
173						
174	<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	-2,67	-1,30	8,78	3,00	3,56
175	4.a. Bangunan	-5,47	-2,90	10,73	3,22	3,66
176	4.b. Non-Bangunan	8,39	5,12	-0,06	1,60	2,28
177						
178	<b>5. Perubahan Inventori</b>	2,25	19,84	-35,56	-3,26	0,52
179						
180	<b>6. Ekspor</b>	2,29	9,70	-1,90	4,02	8,40
181						
182	<b>7. Impor</b>	-3,20	6,08	-3,91	1,84	8,42
183						
184	<b>PDRB (1 s.d 7)</b>	<b>4,38</b>	<b>5,38</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>21</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

## DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

*-Enlighten the Nations-*



**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG**

*BPS - Statistics of Bitung City*

Jl. Stadion Duasudara, Manembonembo, Kota Bitung

Telp. (0438) 31269 Email : [bps7172@bps.go.id](mailto:bps7172@bps.go.id)

Homepage: <https://bitungkota.bps.go.id>